

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam menopang perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu jenis usaha yang sangat banyak di Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga berhasil dalam menciptakan lapangan kerja dan membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah Indonesia, perbankan dan juga lembaga keuangan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pemerintah yang terus berusaha untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan berusaha terus memberi bantuan keuangan melalui kredit usaha. Pemerintah Indonesia juga sangat mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ditengah maraknya pandemi covid 19. Pemerintah Indonesia memberikan bantuan kepada pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk modal usaha. Artinya, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sudah menjadi salah satu titik fokus pemerintah dalam menangani krisis ekonomi.

Meskipun perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat pesat, namun faktanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menghadapi berbagai kendala atau masalah yang disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman mengenai laporan keuangan dan kurangnya keandalan karakteristik keuangan. Pendidikan yang diartikan sebagai proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun non formal, pelaku usaha sektor kecil hendaknya memahami teknologi informasi, agar apa yang telah direncanakan dan diprogramkan dapat dijalankan. Dalam menyusun laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Kendala atau masalah yang terjadi pada sektor ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyebabkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sulit dalam mengelola laporan keuangan. Dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang disiapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan resmi diberlakukan secara efektif 01 Januari 2011 dan diharapkan dapat memudahkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membuat laporan keuangan dengan mudah, transparan, dan akuntabel. Sesuai ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik (entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum).

Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) menjadi salah satu standar yang telah diberlakukan oleh pemerintah guna mempermudah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam membuat laporan keuangan yang lebih sederhana tetapi masih sesuai dengan

standar yang diakui secara Internasional. Namun, fakta yang terjadi tingkat kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih sangat rendah dan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) masih dirasa memberatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta dinilai kurang efektif karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang belum mampu untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Hal ini disebabkan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kurang memiliki pengetahuan akuntansi, dan banyak yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha mereka. Sebagian dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menganggap proses akuntansi tidak penting untuk diterapkan, sehingga pengelolaan laporan keuangan di perusahaan terkesan apa adanya. Hal ini menjadi permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada saat ini, khususnya dibidang keuangan.

UD. Putera Imanuel merupakan salah satu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pengolahan kayu di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara. UD Putera Imanuel berada di Sidihoni Kecamatan Ronggur Nihuta. Hasil dari pengolahan kayu menjadi bahan bangunan jenis kayu seperti papan dan balok kayu. UD Putera Imanuel ini memiliki pangsa pasar yang cukup luas. UD Putera Imanuel tidak hanya dijual di Kabupaten Samosir, tetapi juga ke luar

(diluar Kabupaten Samosir). Tetapi dalam pengelolaan keuangan perusahaan, pemilik mengaku tidak memiliki laporan keuangan. UD. Putera Imanuel hanya memiliki catatan seadanya saja seperti catatan dari penjualan dan pembelian.

Laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan, dimana jika suatu perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang memadai maka kegiatan dalam perusahaan akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, laporan keuangan yang lengkap, handal dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan seperti Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) tentunya sangat diperlukan UD Putera Imanuel dalam pengambilan keputusan apa yang akan dilakukan perusahaan guna untuk kelangsungan usaha untuk periode selanjutnya dan sebagai pertanggungjawaban keuangan perusahaan. Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang dinilai kurang efektif dan dianggap masih memberatkan para pelaku UMKM dapat diterapkan dalam UD. Putera Imanuel jika, UD. Putera Imanuel mau mengerti pentingnya laporan keuangan; memiliki keinginan dan bersedia untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP); dan tidak malas dalam pembuatan laporan keuangan.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) (Studi Kasus pada UD Putera Imanuel, Kabupaten Samosir)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu: **Bagaimana penyusunan laporan keuangan UD Putera Imanuel jika berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) ?**

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan UD Putera Imanuel berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Bagi Akademi**

Bagi akademi penelitian ini diharapkan memberikan informasi penyusunan laporan keuangan UD Putera Imanuel sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

### **2. Bagi Peneliti**

Bagi peneliti penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan bentuk laporan keuangan UD Putera Imanuel berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

### 3. Bagi UD Putera Imanuel

Bagi UD Putera Imanuel penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan tentang pentingnya laporan keuangan dalam perusahaan dan mengetahui bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

##### **2.1.1 Defenisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Definisi UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1:

**“Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan”.<sup>1</sup>**

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa UMKM adalah usaha milik orang perorangan badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan-batasan tertentu.

##### **2.1.2 Kriteria dan Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM:

**UMKM digolongkan berdasarkan kriteria**

**1 Kriteria usaha mikro Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki**

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.20, Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 2008.

hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

- 2 Kriteria usaha kecil Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 ( tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling paling pajak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 3 Kriteria usaha menengah Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling paling pajak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).<sup>2</sup>

## 2.2 Laporan Keuangan

### 2.2.1 Defenisi Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No. 1 adalah sebagai berikut :

**“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.**<sup>3</sup>

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.20, Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 2008.

<sup>3</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, No. 1, Ikatan Akuntan Indonesia, 2015.

Laporan keuangan berguna bagi banker, kreditor, pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan.

### 2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 adalah :

**“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.**<sup>4</sup>

Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan - Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik:

**“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu”.**<sup>5</sup>

Menurut Hery:

**“Tujuan dari Laporan Keuangan adalah untuk memberikan informasi akuntansi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi kredit. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan laporan keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum”.**<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan**, No. 2, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta, 2015.

<sup>5</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik**, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta, 2013.

<sup>6</sup> Hery, **Analisis Laporan Keuangan**, Gravindo, Jakarta, 2016, hal 133.

### 2.2.3 Pihak-pihak Pengguna Laporan Keuangan

Pihak-pihak pengguna laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Standar Akuntansi Keuangan”, adalah sebagai berikut:

a. Investor

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.

b. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

c. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

e. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang atau tergantung pada perusahaan.

f. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

g. Masyarakat

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

### **2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 17 Juli 2009 yang lalu, telah menerbitkan SAK untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau *The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities*, dan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Mei 2009,

SAK-ETAP mulai berlaku efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai atau setelah 01 Januari 2011. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

Berdasarkan ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal (pemiilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit).

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, padatoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

### **2.3.1 Pengakuan dan Pengukuran dalam Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)**

#### 2.3.1.1 Pengakuan dalam Laporan Keuangan

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan pos dalam suatu neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi dalam suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

##### 1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh entitas yang diharapkan menghasilkan manfaat ekonomi dimasa mendatang bagi entitas. Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan.

##### 2. Kewajiban

Kewajiban adalah kewajiban kini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diperkirakan berakibat pada kas keluar dari entitas berupa sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

### 3. Penghasilan

Penghasilan didefinisikan sebagai kenaikan manfaat ekonomis selama periode akuntansi dalam bentuk aliran masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemilik. Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*).

#### 1) Pendapatan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia:

**“Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalty dan sewa”.**<sup>7</sup>

Pendapatan diakui ketika terjadi kenaikan ekuitas pemilik entitas akibat penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan.

#### 2) Keuntungan

Keuntungan adalah kenaikan dalam ekuitas (aktiva bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi perifer (transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi insidental (transaksi yang keterjadiannya jarang)

---

<sup>7</sup> Ikatan Akuntan Keuangan, **Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik**, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta, 2009.

dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan-keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas, tidak termasuk berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan namun bukan pendapatan. Ketika keuntungan diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi.

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

#### 4. Beban

Beban mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa.

- 1) Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi yang diakibatkan oleh penurunan ekuitas, selain menyangkut transaksi dengan pemilik terjadi dalam aktivitas bisnis yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap. Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

2) Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin, atau mungkin tidak, timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Ketika kerugian diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Kerugian merupakan penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi periferal (transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi insidental (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan-keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas, selain berasal dari aktivitas oleh pemilik.

Beban dan kerugian merupakan perubahan Biaya yang relevan dalam perhitungan laba bersih bagi pemilik perusahaan. Terdapat tiga kata kunci pada pengertian rugi yaitu penurunan ekuitas, bukan merupakan transaksi ke pemilik, dan transaksi periferal atau insidental. Perbedaan biaya dan rugi adalah mengenai transaksi periferal atau insidental atau di luar kendali manajemen. Berbeda dengan beban yang timbul akibat dari kendali manajemen yaitu aktivitas penggunaan barang dan jasa.

## 5. Laba Rugi

Laba atau rugi merupakan total pendapatan entitas selama periode operasi dikurangi dengan seluruh biaya yang sudah terjadi dalam periode tersebut. Laba atau rugi menunjukkan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan. SAK-ETAP tidak mengizinkan

pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan “*matching concept*”.

#### 6. Saling Hapus

Dalam Ikatan Akuntan Indonesia, saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban, atau penghasilan dengan beban, kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh SAK-ETAP.

- 1) Pengukuran nilai aset secara neto dari penilaian penyisihan bukan merupakan saling hapus, misalnya penyisihan atas keusangan persediaan dan penyisihan atas piutang tak tertagih.
- 2) Jika aktivitas entitas yang biasa tidak termasuk membeli dan menjual aset tidak lancar (termasuk investasi dan aset operasional), maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset dengan mengurangi hasil penjualan dengan jumlah tercatat aset dan beban penjualan yang terkait.

#### 7. Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan

Konsep probabilitas mengacu pada tingkat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke atau dari dalam entitas. Entitas menilai probabilitas atau tingkat ketidakpastian dalam aliran manfaat masa depan berdasarkan bukti yang tersedia dalam penyusunan laporan keuangannya. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat pada arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang terkait dengan kondisi yang tersedia pada akhir periode pelaporan saat penyusunan laporan keuangan. Penilaian itu dibuat secara individu untuk pos-pos yang signifikan secara

individual dan kelompok dari suatu populasi besar dari pos-pos yang tidak signifikan secara individual.

### 2.3.1.2 Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar :

- 1) Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

Menurut Lestari:

**“Prinsip Biaya historis yaitu merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diserahkan atau memperoleh aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan jumlah yang dapat distribusikan langsung ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan ketentuan”.**<sup>8</sup>

- 2) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

Menurut Sonbay:

**“Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dalam penjualan aset**

---

<sup>8</sup> Lestari Yona Octiani, **Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) dan Manajemen Laba di Indonesia**, Jurnal Akuntansi EI Muhasaba, 2011, hal 9.

**atau pembayaran untuk mentransfer kewajiban dalam transaksi yang tertata antara partisipan di pasar dan tanggal pengukuran fair value dengan asumsi bahwa entitas merupakan unit yang akan beroperasi selamanya tanpa ada intensi atau keinginan untuk melikuidasi, untuk membatasi secara material skala operasinya atau transaksi dengan persyaratan yang merugikan”<sup>9</sup>**

### 2.3.1.3 Keandalan Pengukuran

Informasi dianggap dapat diandalkan jika lengkap, bebas dari kesalahan atau bias yang material, terpercaya, dan dapat diharapkan untuk mempresentasikan secara wajar substansi ekonomi dari peristiwa atau transaksi yang mendasari tanpa memandang bentuk hukum peristiwa atau transaksi tersebut. Suatu pos yang pada saat tertentu tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan dapat memenuhi syarat untuk diakui di masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian. Suatu pos yang gagal memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan. Pengungkapan ini dapat dibenarkan jika pengetahuan mengenai pos tersebut dipandang relevan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas oleh pengguna laporan keuangan.

### 2.3.2 Laporan Keuangan Sesuai SAK-ETAP

Sesuai Standar Akuntansi Keuangan–Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), laporan keuangan entitas lengkap meliputi:

#### 1. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu Entitas pada tanggal tertentu.

---

<sup>9</sup>Sonbay, **Perbandingan Biaya Historis dan Nilai Wajar**, Jurnal Ilmiah dan Kajian Akuntansi, 2010, Vol. 2, hal 4.

Dalam neraca, aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang disajikan sebagai klasifikasi yang terpisah, kecuali untuk industri tertentu dimungkinkan penyajian berdasarkan likuiditas jika hal tersebut memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka Entitas menyajikan seluruh aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas. Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu akhir periode pelaporan. Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Informasi yang disajikan dalam neraca yaitu minimal mencakup pos-pos berikut:

1. Kas dan setara kas;
2. Piutang usaha dan piutang lainnya;
3. Persediaan;
4. Properti investasi;
5. Aset tetap;
6. Aset tidak berwujud;
7. Utang usaha dan utang lainnya;
8. Aset dan kewajiban pajak;
9. Kewajiban diestimasi;
10. Ekuitas.

## 2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan ukuran keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Ukuran laba menggambarkan kinerja manajemen dalam menghasilkan profit untuk membayar bunga kreditur, deviden investor, dan pajak pemerintah. SAK-ETAP mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya selama periode tersebut. Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK-ETAP mensyaratkan lain. SAK-ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan). Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi yang disajikan di dalam laporan laba rugi mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan;
2. Beban keuangan;
3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;
4. Beban pajak;
5. Laba atau rugi bersih.

### 3. Laporan Perubahan Ekuitas (Laporan Perubahan Modal)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi, dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut. Informasi yang disajikan di laporan perubahan ekuitas entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

1. Laba atau rugi untuk periode;
2. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
3. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan;
4. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
  - 1) laba atau rugi;
  - 2) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
  - 3) jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

#### 4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu dan memberikan penjelasan mengenai alasan perubahan tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber penerimaan kas dan untuk apa penggunaannya dalam kegiatan operasional, pembiayaan, investasi . Menurut Tukunang:

**“Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi tentang penerimaan–penerimaan kas(*cash receipts*) dan pembayaran–pembayaran kas (*cash payments*) dari suatu entitas selama periode tertentu. Tujuan berikutnya adalah untuk memaparkan informasi tentang kegiatan–kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan dari suatu entitas selama periode tertentu”.**<sup>10</sup>

Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendana.

##### a. Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi menyajikan seluruh transaksi penerimaan kas yang berkaitan dengan pendapatan penjualan dan kas keluar yang berkaitan dengan biaya operasi, termasuk pembayaran kepada pemasok barang atau jasa, pembayaran upah, bunga dan pajak. Arus kas dari aktivitas operasi terutama

---

<sup>10</sup> Tukunang dll, **Penerapan Laporan Arus Kas berdasarkan Sak-Etap pada UD. Berkat Anugerah**, Jurnal Akuntansi EMBA, 2012, Vol.2, No 2, hal 831.

diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;
2. Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain;
3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
4. Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan;
5. Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi;
6. Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.

Beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi. Tetapi, arus kas yang menyangkut transaksi tersebut merupakan arus kas dari aktivitas investasi.

b. **Aktivitas Investasi**

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan

pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi:

1. Pembayaran uang untuk membeli aktiva tetap, aktiva tidak berwujud dan aktiva jangka panjang lain, termasuk pengembangan yang dikapitalisasikan dan aktiva tetap yang dibangun sendiri.
2. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tidak berwujud dan aktiva jangka panjang lain.
3. Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain.
4. Uang muka pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan).
5. Pembayaran sehubungan dengan *future contracts*, *forward contracts*, *option contracts* dan *swap contracts* kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan perdagangan (*dealing or trading*), atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.

c. Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan timbul dari penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan transaksi pendanaan jangka panjang dengan pemilik entitas dan kreditor. Arus kas dari aktivitas pendanaan antara lain berasal dari transaksi:

1. Penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain;
2. Penarikan atau penebusana saham;
3. Penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka

pendek dan jangka panjang lain;

4 Pelunasan pinjaman; dan

5 Pembayaran sewa pembiayaan untuk mengurangi saldo liabilitas.

#### 5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Adapun struktur dari catatan atas laporan keuangan harus:

1. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan;
2. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK-ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan

3. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK-ETAP;
2. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan;
3. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut;
4. Pengungkapan lain.

### 2.3.3 Penyajian laporan Keuangan Sesuai SAK-ETAP

SAK-ETAP mengatur penyajian laporan keuangan sebagai berikut:

1. Penyajian Wajar

Menurut Sumarsan:

**“Laporan keuangan suatu entitas dikatakan wajar apabila semua komponen dari laporan keuangan telah saling mencocokkan dan secara otomatis neraca harus seimbang dengan berimbangannya bagian debit dan kredit”.**<sup>11</sup>

Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tapan Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi

---

<sup>11</sup> Sumarsan Thomas, **Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS**, Jilid 1, Edisi 2, Indeks, Jakarta, 2013.

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK-ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

## 2. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK-ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK-ETAP. Ketepatan waktu merupakan batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Akumulasi, peringkasan, dan penyajian selanjutnya informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin tersedianya informasi sekarang di tangan pemakai. Ketepatan waktu juga menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai.

## 3. Kelangsungan Usaha

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK-ETAP membuat nilai atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas yang tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap

mempunyai kelangsungan usaha.

#### 4. Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun maka entitas mengungkapkan: (a) fakta tersebut; (b) alasan penggunaan periode lebih panjang atau lebih pendek; dan (c) fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan.

#### 5. Penyajian yang Konsisten

Menurut Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam):

**“Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:**

- 1) Setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau mengkaji ulang atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam standar akuntansi yang digunakan,**
- 2) Perubahan penyajian yang diperkenankan oleh standar akuntansi yang digunakan. Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi: (a) sifat reklasifikasi; (b) jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi; dan (c) alasan reklasifikasi. Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan: (a) alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan; dan (b) sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif**

**direklasifikasi”.**<sup>12</sup>

#### 6. Informasi Komparatif

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK-ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

#### 7. Materialitas dan Agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.

Pos-pos yang material, meskipun bukan merupakan komponen utama laporan keuangan, disajikan terpisah. Menurut Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam):

**“Untuk tujuan agregasi, pengertian material adalah sebagai berikut:**

- 1) 5% dari jumlah seluruh aset untuk pos-pos aset,**
- 2) 5% dari jumlah seluruh liabilitas untuk pos-pos liabilitas,**
- 3) 5% dari jumlah seluruh ekuitas untuk pos-pos ekuitas,**
- 4) 10% dari pendapatan untuk pos-pos laba rugi komprehensif, dan**
- 5) 10% dari laba sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksiseperti perubahan estimasi akuntansi”.**<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, **Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik**, 2012.

<sup>13</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, **Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik**, 2012.

Untuk pos-pos yang nilainya tidak material, tetapi merupakan komponen utama laporan keuangan, harus disajikan terpisah. Sedangkan untuk pos-pos yang nilainya tidak material dan tidak merupakan komponen utama, dapat digabungkan dalam pos tersendiri, namun harus dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pos yang berbeda tetapi mempunyai sifat atau fungsi yang sama dapat digabungkan dalam satu pos jika saldo masing-masing akun tidak material.

#### 8. Identifikasi Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan agar laporan yang dibuat dapat mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam laporan yang telah dibuat. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan:

- 1) Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir;
- 2) Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;
- 3) Mata uang pelaporan;
- 4) Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.
- 5) Domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantornya yang terdaftar;

6) Penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya.

#### **2.3.4 Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan SAK-ETAP**

Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan:

##### 1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu. Untuk memberikan penjelasan kepada pengguna dan memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan, informasi keuangan harus mudah dipahami oleh mereka.

##### 2. Relevan

Informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

##### 3. Materialitas

Materialitas berarti bahwa informasi harus cukup penting bagi pemakai, sehingga jika diabaikan atau dinyatakan secara salah, hal tersebut akan

membuat keputusan yang diambil pemakai menjadi berbeda. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK-ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

#### 4. Keandalan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu. Informasi dikatakan dapat diandalkan atau memiliki karakteristik kualitatif reliabilitas jika informasi tersebut: Dapat diuji; disajikan secara tepat, relatif bebas dari kesalahan, menggambarkan keadaan yang sebenarnya; dan netral.

#### 5. Substansi Mengungguli Bentuk

Substansi mengungguli bentuk dimaksudkan untuk menyajikan informasi dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Transaksi, peristiwa dan

kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

#### 6. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi dan tidak mengizinkan bias .

#### 7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi. Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan .

#### 8. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara

relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut. Dapat dibandingkan dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan membantu pengguna dalam melakukan analisis:

- 1) Analisis seri waktu (atau *tren/ time series*), yaitu membandingkan laporan keuangan suatu entitas selama periode waktu untuk mengidentifikasi tren dalam posisi keuangan dan kinerja suatu entitas.
- 2) Analisis lintas bagian (*cross-sectional*), yaitu membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan arus kas secara relatif.

#### 9. Tepat Waktu

Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan akan kehilangan relevansinya. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan penggundalam mengambil keputusan ekonomi.

## 10. Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat

Informasi sesungguhnya sama seperti komoditas lainnya dimana nilai dari informasi harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan informasi tersebut sehingga perlu diperhitungkan hubungan antara biaya dan manfaat yang diperoleh. Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek dan Subjek Penelitian**

##### **3.1.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada salah satu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Samosir yaitu UD. Putera Imanuel yang beralamat di Sidihoni, Kecamatan Ronggurnihuta.

##### **3.1.2 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah pemilik UD. Putera Imanuel yang akan memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan UD. Putera Imanuel sesuai Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

#### **3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif.

Menurut Sugiyono:

**“Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan generalisasi”.**<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sugiyono, **Memahami Penelitian Kualitatif**, Alfabeta, Bandung, 2013.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Morissan:

**“Penelitian Deskriptif merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati dan cermatnya dan karenanya lebih akurat dan tepat dibandingkan dengan pengamatan biasa sebagaimana yang dilakukan wartawan”.**<sup>15</sup>

Penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai Penyusunan Laporan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada UD. Putera Imanuel.

### **3.3 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

#### **3.3.1 Data Primer**

Menurut Sugiyono:

**“Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari informasi tanpa melalui media perantara”.**<sup>16</sup>

Data primer dari UD. Putera Imanuel adalah data yang memuat informasi tentang keuangan UD. Putera Imanuel. Data Primer diperoleh langsung dari pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) UD. Putera Imanuel dengan cara observasi ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara. Dimana pihak yang memberikan informasi tentang keuangan perusahaan adalah pemilik UD. Putera Imanuel.

---

<sup>15</sup> Morissan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Ketiga: PRENADA MEDIA GRUP, Jakarta, 2015, hal 37.

<sup>16</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan**, Alfaberta, Bandung, 2015, hal 245.

### 3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sunyoto:

**“Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan-catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, media informasi, dan bahan-bahan lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti”.**<sup>17</sup>

Data sekunder ini diperoleh oleh peneliti dengan cara mempelajari buku-buku dan referensi yang berhubungan dengan topik permasalahan. Yang menjadi data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sejarah singkat berdirinya UD. Putera Imanuel, Struktur organisasi UD. Putera Imanuel.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, antara lain :

#### 3.4.1 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian.

Menurut Mahi M. Hikmat:

**“Dokumentasi yakni penelusuran dan pemerolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia”.**<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sunyoto, **Metode Penelitian Akuntansi**, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal 214.

<sup>18</sup> Mahi M. Hikmat, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2014, hal 83.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh catatan keuangan yang dimiliki oleh UD. Putera Imanuel.

### 3.4.2 Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik wawancara. Menurut Lexy J. Moleong:

**“Wawancara adalah percakapan yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan”.**<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab kepada pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) UD. Putera Imanuel secara terstruktur dan secara langsung terkait dalam keuangan dan pencatatan perusahaan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai keuangan perusahaan.

### 3.5 Analisis Data

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Teori Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam model analisis data terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Reduksi data (*Data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hal 215.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, laptop, dan sebagainya. Reduksi data pada penelitian ini dengan cara mencari informasi dari hasil pengumpulan data yang dilakukan sebelumnya dan memilah-milah serta memfokuskan pada pelaporan keuangan yang dilakukan UD. Putera Imanuel.

2. Penyajian data (*Data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut. Dari hasil reduksi data yang dilakukan peneliti kemudian disajikan kembali sebagai data keuangan untuk dijadikan data yang kemudian diolah menjadi laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langkah ketiga analisis data dari

penelitian ini yaitu menyusun laporan keuangan UD Putera Imanuel berdasarkan SAK-ETAP dan penarikan kesimpulan.